

KETERKAITAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PERKEMBANGAN WILAYAH, DAN DISPARITAS DI KABUPATEN SLEMAN

Syavitri Sukma Utami Rambe¹, Doddy Aditya Iskandar²

^{1,2} Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Informasi Artikel:

Diterima: 1 Maret 2021
Naskah perbaikan: 30 Desember 2021
Disetujui: 31 Desember 2021
Tersedia Online: 31 Juli 2022

Kata Kunci:

Pertumbuhan ekonomi,
perkembangan wilayah,
disparitas

Korespondensi:

Syavitri Sukma Utami Rambe
Departemen Teknik Arsitektur
dan Perencanaan Fakultas
Teknik Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia

Email:

ami.syavitri@gmail.com

Abstrak: Pembangunan sangat erat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah dikatakan memiliki pembangunan yang baik jika memiliki jumlah penduduk miskin dan ketimpangan rendah. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan (1) pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah (2) keterkaitan kemiskinan dan disparitas wilayah serta (3) peran pemerintah terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Sleman. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari BPS dan penelitian sebelumnya serta data primer berupa wawancara dengan pihak pemerintah daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan evaluatif dan pemetaan. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang pesat terjadi di kawasan perkotaan. Adanya hal tersebut mengindikasikan perbedaan distribusi pendapatan. Jika dilihat dari hasil klasifikasi tipologi klassen terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman yang masih termasuk dalam wilayah relatif tertinggal. Berdasarkan hasil indeks williamson, Kabupaten Sleman termasuk dalam ketimpangan moderat yang artinya hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat dinikmati oleh penduduk secara merata. Meskipun demikian peran pemerintah dalam perkembangan wilayah sangat penting sebagai koordinator dan fasilitator.

Abstract: There is a strong correlation between regional development and economic growth. Regional development is expected to lower regional disparity and poverty rate. This research is conducted to investigate the correlation between (1) economic growth and regional development, (2) poverty rate and regional disparity, and (3) the role of government in regional development with a case study in Sleman Regency. This research utilized both primary data, obtained by conducting interviews with local government and secondary data provided by previous research and National Statistical Bureau (BPS) database. This research utilized an evaluative descriptive approach, combined with the utilization of spatial data visualization. This research shows that economic growth and regional development in Sleman Regency mostly occur in the urbanized area. There is unequal revenue distribution between urbanized and less urbanized areas, with some districts in Sleman Regency lagging behind. The analysis of Williamson's Index also shows that Sleman Regency could be categorized as a region with moderate economic disparity. This



research underpins the role of local government as coordinator and facilitator in the regional development process.

Copyright ©2022

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses atau rangkaian usaha yang dilakukan suatu wilayah secara terencana untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik menggunakan sumberdaya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (Muhammad, 2017). Pembangunan sangat erat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan teori ekonomi klasik menganggap bahwa faktor internal yang merupakan investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan perekonomian jangka panjang. Pemerintah hanya berkontribusi dalam melakukan pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan pajak. Faktanya, faktor internal bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah melainkan terdapat faktor eksternal yang juga ikut berpengaruh. Teori modern menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari output pertumbuhan barang dan jasa dipengaruhi oleh persediaan modal, jumlah angkatan kerja, serta kemajuan teknologi. Pemerintah hanya dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi yang berdampak pada jumlah tenaga kerja namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Ma'rif dan Wihastuti, 2008).

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki letak strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Terdapat wilayah aglomerasi dampak perkembangan dari perkotaan Yogyakarta di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Depok, Gamping, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Mlati. Selain itu terdapat wilayah peri-urban/sub-urban seperti Kecamatan Godean, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Ngaglik, yang berlokasi agak berjauhan dengan Kota Yogyakarta namun potensial untuk berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat. Kabupaten Sleman juga termasuk dalam wilayah yang memiliki jalur ekonomi sebagai penghubung antar kota-kota pelabuhan utama seperti Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Hal ini memicu pesatnya perkembangan wilayah di Kabupaten Sleman. Data BPS menyebutkan bahwa nilai laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan di Kabupaten Sleman pada tahun 2014-2019 cukup baik. Angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman empat tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan DIY, namun pada tahun 2017-2019 angka pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan Kulon Progo.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di DIY Tahun 2014-2019 (%)

No	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kulon Progo	4,57	4,62	4,76	5,97	10,84	13,49
2	Bantul	5,04	4,97	5,06	5,10	5,47	5,53
3	Gunung Kidul	4,54	4,82	4,89	5,00	5,16	5,33
4	Sleman	5,30	5,18	5,25	5,35	6,42	6,49
5	Yogyakarta	5,28	5,09	5,11	5,24	5,49	5,96
DIY		5,17	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60
Indonesia		5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

(Sumber: BPS DIY, 2014-2019)

Nilai IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar 83,85, menempati urutan kedua setelah Kota Yogyakarta (88,65). IPM Sleman termasuk yang paling tinggi diantara

kabupaten-kabupaten di Provinsi DIY. Angka IPM di Kabupaten Sleman juga berada di atas rata-rata IPM Nasional yang bernilai 71,92.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY 2014-2019

No	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kulon Progo	70,68	71,52	72,38	73,23	73,78	74,44
2	Bantul	77,11	77,99	78,42	78,87	79,45	80,01
3	Gunung Kidul	67,03	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96
4	Sleman	80,73	81,20	82,15	82,85	83,42	83,85
5	Yogyakarta	76,81	84,56	85,32	85,49	86,11	88,65
DIY		76,81	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99
Indonesia		68,90	69,55	70,18	70,18	71,39	71,92

(Sumber: BPS DIY, 2014-2019)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami kenaikan sebesar 0,15% untuk nilai P1 dan 0,03% untuk nilai p2 dibandingkan tahun 2018. Walaupun jumlah penduduk miskin secara keseluruhan di Kabupaten Sleman berkurang, namun jika dilihat dari disparitas wilayah di Kabupaten Sleman, 70% wilayah termasuk dalam kategori daerah relatif tertinggal dan sedang tumbuh, sementara 30% wilayah masuk ke dalam kategori daerah tertekan dan pertumbuhan cepat (Devi, 2018). Apabila dilihat dari distribusi tingkat ketimpangan pendapatan penduduk atau nilai indeks ginya, rata-rata indeks gini di Kabupaten Sleman lebih tinggi dari pada Indonesia tetapi masih lebih rendah dari pada Provinsi DIY. Kabupaten Sleman masih termasuk dalam wilayah yang memiliki kriteria ketimpangan moderat, artinya hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat dinikmati oleh penduduk secara merata serta terjadinya ketimpangan antara penduduk yang memiliki penghasilan rendah dengan penduduk yang memiliki penghasilan tinggi.

Berdasarkan ulasan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui keterkaitan pertumbuhan ekonomi, perkembangan wilayah, dan disparitas di Kabupaten Sleman dilihat dari data tahun 2014-2019. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pemerintah daerah terkait pengembangan pembangunan serta perencanaan wilayah di Kabupaten Sleman di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam mendapatkan data pada saat melakukan penelitian. Teknik ini terbagi menjadi dua yaitu survei primer dan survei sekunder. Survei primer yang dilakukan adalah dengan wawancara kepada pihak pemerintah daerah. Wawancara kepada pihak pemerintah daerah ini dilakukan karena pemerintah selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Wawancara dilakukan dengan tipe wawancara terbuka dengan tujuan sebagai bentuk validasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, apakah hasil temuan sejalan dengan kondisi eksisting yang ada. Sedangkan untuk survei sekunder didapatkan dari data sekunder yang berasal dari data BPS serta hasil penelitian terdahulu. Data sekunder yang dibutuhkan diantaranya adalah Kabupaten Sleman dalam angka, statistik kesejahteraan Kabupaten Sleman, kecamatan dalam angka, nilai Indeks Williamson, klasifikasi Tipologi Klassen.

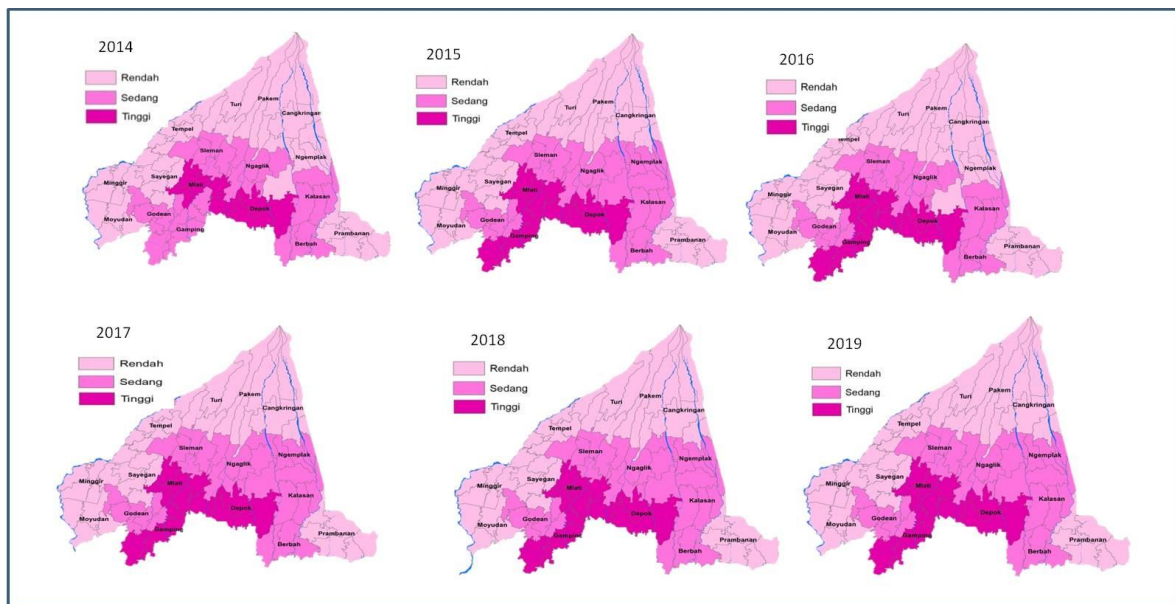
2.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif evaluatif Analisis deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Pendekatan evaluatif yang dimaksud adalah evaluasi dari kondisi eksisting yang ada dengan kriteria, tolak ukur, serta standar yang digunakan sebagai pembandingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi menurut Kementerian Keuangan adalah proses perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Dalam pembangunan wilayah, faktor demografis berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi geografis yang berbeda-beda tiap daerah menyebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam serta sumber daya manusia yang baik dan ada daerah yang tidak memiliki hal tersebut, sehingga menimbulkan terjadinya distribusi penduduk yang tidak merata. Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang menjadi tempat tujuan untuk tinggal baik untuk sementara waktu maupun untuk dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sleman memiliki potensi dari segi pendidikan serta pariwisata yang dapat mendorong perekonomian. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya. Berikut ini merupakan peta penggambaran kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun 2014-2019.

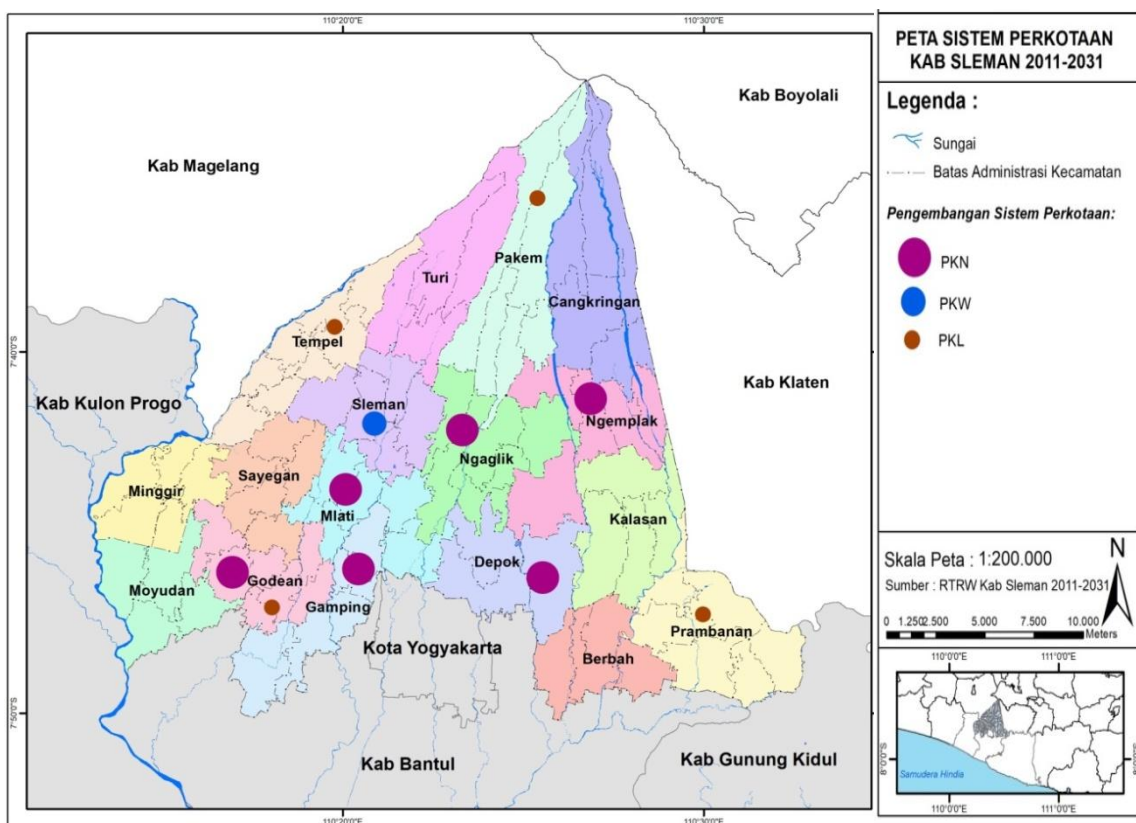


Gambar 1. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2014-2019
(Sumber: Hasil Analisa, 2021)

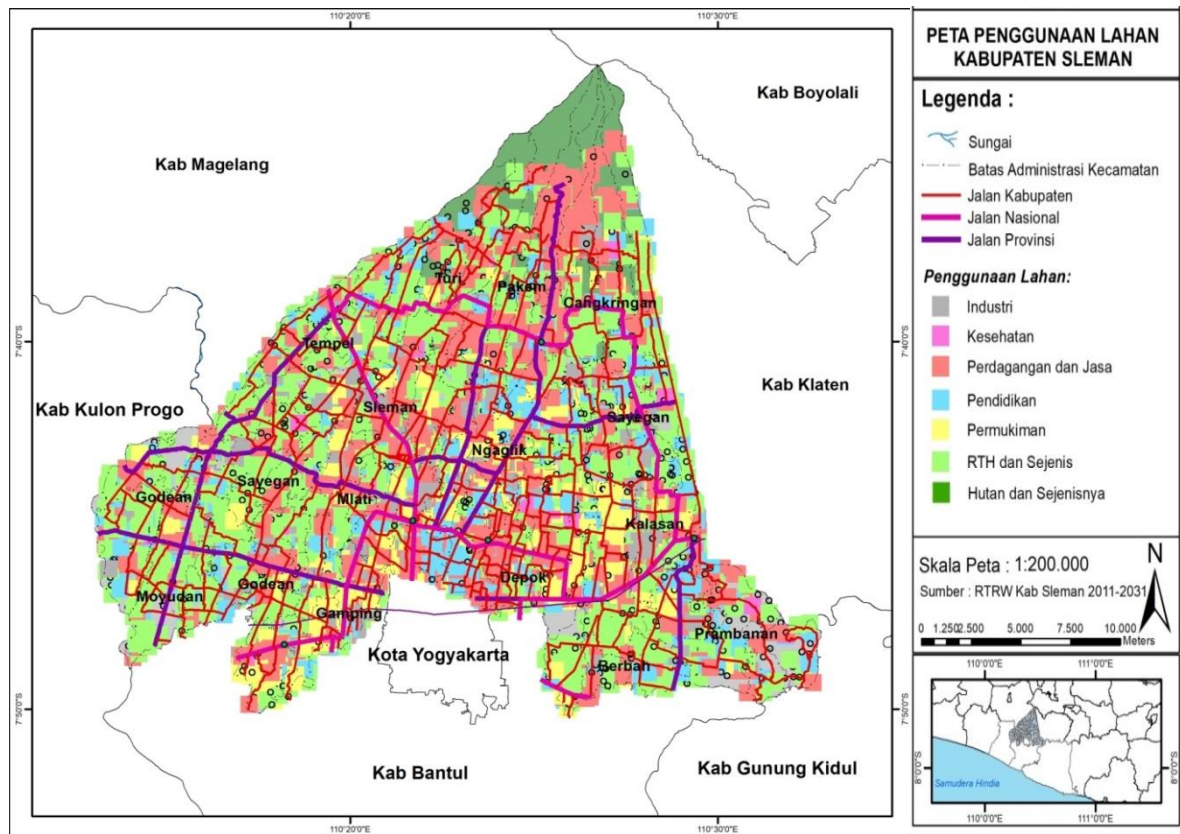
Pada peta tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi atau termasuk dalam kategori I adalah Kecamatan Depok, Mlati, serta Gamping. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang dilalui oleh jalan-jalan nasional dan provinsi dengan mayoritas aktivitas kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa. Perkembangan pada ketiga kecamatan tersebut memicu pertumbuhan wilayah sekitarnya. Terbukti dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Sleman, Ngaglik,

Ngemplak, Godean, Kalasan, dan Berbah masuk dalam kategori II atau wilayah yang memiliki kepadatan sedang. Terjadinya pemusatan penduduk di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman membentuk suatu kawasan perkotaan.

Berdasarkan perda RTRW Kaupaten Sleman No 12 Tahun 2012, Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kabupaten Sleman termasuk dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta atau yang biasa disebut KPY. Pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Sleman yang utama adalah pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat kegiatan wilayah (PKW). Kecamatan yang masuk ke dalam PKN adalah Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngemplak, serta Kecamatan Ngaglik. Kecamatan yang termasuk dalam PKW terdapat di Kecamatan Sleman. Adanya pemusatan kegiatan tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur dan perubahan penggunaan lahan. Berikut ini merupakan pemetaan yang menggambarkan titik-titik sistem pusat kegiatan serta persebaran penggunaan lahan di Kabupaten Sleman.



Gambar 2. Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Sleman 2011-2031
(Sumber: RTRW Kab Sleman, 2011-2031)



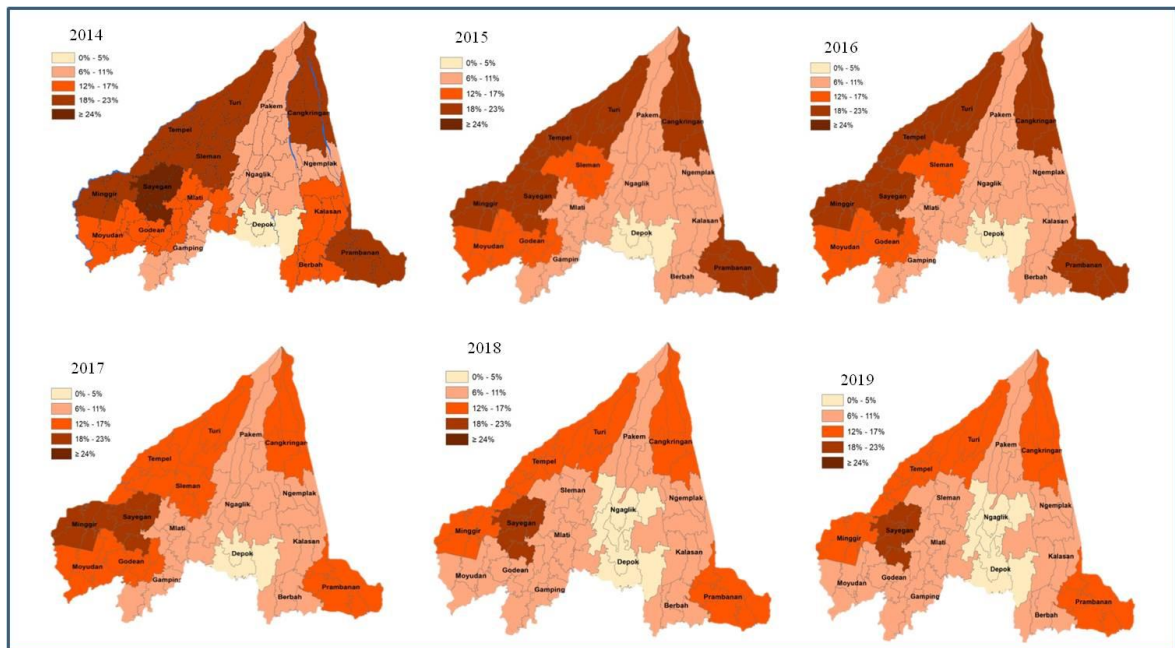
Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman 2021
(Sumber: RTRW Kab Sleman, 2011-2031)

Berdasarkan pemetaan tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat kegiatan perkotaan baik nasional maupun wilayah di dominasi oleh penggunaan lahan untuk perdagangan jasa, permukiman, dan pendidikan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan distribusi pendapatan antar kecamatan.

3.2. Kemiskinan dan Disparitas Wilayah

Suatu daerah dikatakan berhasil dalam pembangunan dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah ketimpangan yang terjadi antar wilayah di suatu daerah mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Faktanya, pertumbuhan pembangunan tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Terdapat wilayah yang berkembang pesat namun ada pula wilayah yang cenderung berkembang lambat. Wilayah yang tumbuh lambat biasanya disebabkan oleh faktor kurangnya sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun inovasi pengembangan potensi daerah yang memicu timbulnya kemiskinan.

BPS menyebutkan kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh rumah tangga atau seseorang, sehingga tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan yang layak bagi kehidupannya. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman jika dilihat dari persentase KK miskin mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2014-2019. Berikut ini merupakan peta penggambaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman yang sudah diklasifikasikan menjadi lima kategori dari tahun 2014 – 2019.



Gambar 4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2019
(Sumber: Hasil Analisa, 2021)

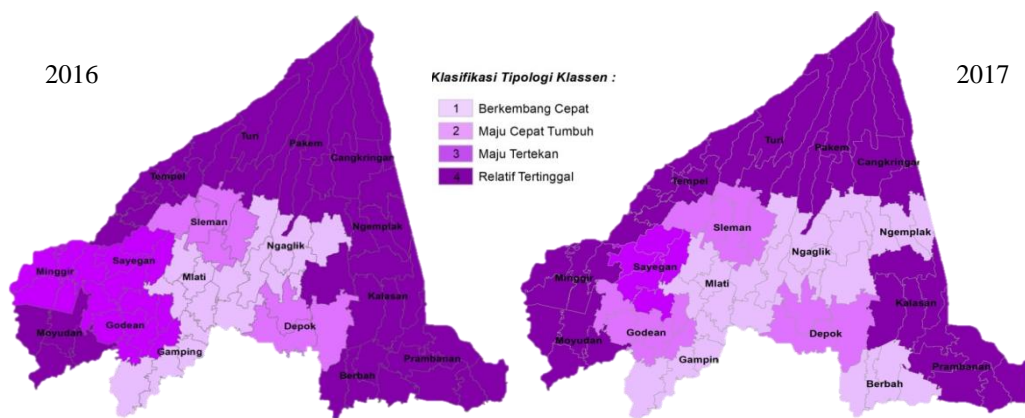
Berdasarkan hasil pemetaan dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kecamatan Sayegan, dimana kecamatan tersebut selama kurun waktu 2014-2019 masuk dalam kategori IV dan III. Sementara untuk kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan terendah adalah Kecamatan Depok. Jika dilihat dari kurun waktu 2014-2019, Kecamatan Depok selalu berada pada kategori I dengan nilai persentase KK miskin terkecil. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman terdapat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Keberadaan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemiskinan dapat terjadi apabila ada ketimpangan sosial di suatu wilayah, dimana distribusi pendapatan antar penduduknya mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Tingkat kemiskinan dan disparitas memiliki hubungan linier yang negatif. Apabila tingkat kemiskinan disuatu wilayah meningkat maka akan meningkatkan pula disparitas antar wilayahnya.

Alat ukur untuk menghitung disparitas wilayah yang biasa digunakan adalah Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. Tipologi kelas berguna untuk menggambarkan klasifikasi ekonomi wilayah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB. Berikut ini merupakan tipologi wilayah per kecamatan di Kabupaten Sleman berdasarkan tipologi kelas.

Tabel 3. Tipologi Klassen per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017

Laju pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
n > r	Kuadran 1 (Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh) 2016 : Depok dan Sleman 2017 : Depok, Godean, dan Sleman	Kuadran II (Wilayah berkembang cepat) 2016 : Gamping, Mlati, dan Ngaglik 2017 : Gamping, Mlati, Ngaglik, Berbah dan Ngemplak
n < r	Kuadran III (Wilayah maju tapi tertekan) 2016 : Minggir, Sayegan, dan Godean 2017: Sayegan, dan Pakem	Kuadran IV (Wilayah relative tertinggal) 2016: Moyudan, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan 2017: Moyudan, Minggir, Prambanan, Kalasan, Tempel, Turi, dan Cangkringan

(Sumber: Triyanto, 2019 & Devi, 2018)



Gambar 5. Klasifikasi Tipologi Klassen di Kabupaten Sleman tahun 2016-2017
(Sumber : Triyanto & Devi, diolah)

Berdasarkan klasifikasi tipologi kelas tahun 2016-2017 tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan yang selalu termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal adalah Kecamatan Moyudan, Prambanan, Kalasan, Tempel, Turi, dan Cangkringan. Sementara untuk kecamatan yang selalu termasuk dalam kategori wilayah cepat maju dan tumbuh adalah Kecamatan Depok dan Sleman. Jika dilihat berdasarkan KK miskin Kecamatan Depok termasuk dalam kategori kecamatan dengan tingkat kemiskinan terendah. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian di Kecamatan Depok merupakan perdagangan dan jasa dan memiliki sarana prasarana penunjang yang baik, sehingga perputaran uang dan penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Sleman. Kecamatan Tempel, Turi, Cangkringan, serta Prambanan termasuk dalam kategori III yaitu memiliki kategori KK miskin sebesar 12%-17%. Jika dilihat dari karakteristik tipologi kelas keempat kecamatan tersebut selalu masuk ke dalam kuadran IV yaitu wilayah yang relatif tertinggal. Tidak jauh berbeda, Kecamatan Moyudan dan Kalasan juga termasuk dalam wilayah yang relatif tertinggal walaupun dari segi persentase KK miskin kedua kecamatan tersebut termasuk dalam kategori II. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya potensi wilayah di kecamatan-kecamatan tersebut yang hanya mengandalkan sumber daya alam atau pertanian. sehingga timbullah disparitas antara wilayah Kabupaten Sleman bagian utara, timur, dan barat terhadap wilayah di Kabupaten Sleman bagian tengah dan selatan. Berikut ini merupakan hasil pemetaan persebaran perkembangan berdasarkan tipologi kelas di Kabupaten Sleman.

Kemendikbud menjelaskan ketimpangan ekonomi merupakan suatu keadaan tidak seimbang di masyarakat yang menyebabkan terjadinya perbedaan mencolok terutama terkait kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang tinggal disuatu lingkungan atau wilayah tertentu. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesenjangan wilayah adalah Indeks Williamson.

Tabel 4. Indeks Williamson Kabupaten Sleman Tahun 2014-2019

Tahun	Indeks Williamson	Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (%)
2010	0,498	4,49
2011	0,422	5,19
2012	0,421	5,45
2013	0,405	5,70
2014	0,408	5,85
2015	0,430	5,18
2016	0,485	5,25
2017	0,490	5,35
2018	0,495	5,39
2019	0,499	5,48

(Sumber: BPS DIY, diolah)

Indeks kesenjangan Williamson menghasilkan angka lebih besar atau sama dengan nol. Jika indeks > 0 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan maka tingkat kesenjangan antar kecamatan di suatu kabupaten semakin besar (Muta'ali, 2015). Adapun kriteria ketimpangan menurut Muta'ali (2015):

1. Jika $0,1 < IW < 0,35$, maka termasuk dalam ketimpangan wilayah ringan/rendah
2. Jika $0,35 < IW < 0,50$, maka termasuk dalam ketimpangan wilayah sedang/moderat
3. Jika $IW > 0,5$, maka termasuk dalam ketimpangan wilayah berat/tinggi

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Sleman terus meningkat dan masuk dalam kriteria ketimpangan moderat. Artinya hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat dinikmati oleh penduduk secara merata. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari salah satu staf BAPPEDA yang menyebutkan bahwa, untuk saat ini ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Sleman masih tergolong tinggi karena perbedaan fokus kegiatan perekonomian dan potensi wilayah antar kecamatan.

3.3. Peran Pemerintah terhadap Perkembangan Wilayah

Keberadaan infrastruktur daerah yang ada di Kabupaten Sleman secara garis besar berdasarkan hasil perhitungan tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi wilayah. Teori modern menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh persediaan modal, jumlah angkatan kerja, serta kemajuan teknologi. Pemerintah hanya dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi yang berdampak pada jumlah tenaga kerja namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008). Seiring dengan adanya perkembangan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki ruang dan kesempatan yang lebih luas dalam berkreasi dan berinovasi untuk pengembangan wilayah. Terdapat empat peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi berdasarkan Lincoln Arsyad (Subandi 2007: 119-120), yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah. Adapun peran yang terkait dalam penelitian ini adalah:

A. Peran Pemerintah Sebagai Koordinator

Pada peran ini pemerintah diharuskan bertindak sebagai penghubung dalam hal pembangunan ekonomi di daerah melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau pengusulan strategi terkait pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah juga turut bekerja sama melibatkan masyarakat dalam proses pra perencanaan, perencanaan, serta pasca perencanaan. Selain itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran belanja yang ada sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan monitoring program-program yang telah diusulkan, apakah program tersebut sudah terelasisasi dengan baik atau belum, serta apakah program tersebut mampu mengatasi permasalahan yang ada dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa staf pemerintah daerah diketahui bahwa selama ini program-program yang diusulkan oleh pemerintah daerah telah berdasarkan prioritas pembangunan dan urgensi permasalahan yang harus diselesaikan. Untuk alokasi belanja sendiri di Kabupaten Sleman sudah memenuhi standar minimal pengeluaran dana sesuai dengan aturan dari pemerintah dan sebagian besar dari prioritas program-program tersebut telah mencapai target. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa meskipun diparitas dan di Kabupaten Sleman cukup tinggi, akan tetapi peran pemerintah sangat penting untuk mengorganisir kebutuhan serta kepentingan masyarakat terkait pembangunan ekonomi. Pemerintah juga berperan sebagai monitoring dan evaluator program. Adanya peran pemerintah sebagai koordinator ini sangat berdampak pada kelancaran pembangunan di Kabupaten Sleman agar berjalan sesuai dengan visi misi yang ada.

B. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pada peran ini pemerintah berperan untuk memfasilitasi dalam proses percepatan pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan kebijakan tata ruang daerah yang lebih baik. Bukan hanya itu peran pemerintah juga diharuskan membantu dunia usaha untuk memeberikan kemudahan perijinan bagi investor dengan tetap berpegang teguh terhadap kebijakan tata ruang yang ada.

Hasil wawancara dengan staf pemerintah dapat diketahui bahwa sejauh ini pemerintah tengah mengupayakan untuk pengurangan disparitas wilayah yang ada di bagian barat, bagian timur, serta bagian utara di Kabupaten Sleman dengan cara mencari inovasi dan memaksimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Pihak pemerintah Kabupaten Sleman saat ini sedang memikirkan cara untuk pengembangan daya tarik wisata (DTW) sesuai dengan potensi di masing-masing daerah tanpa merubah fungsi kawasan yang telah diatur di rencana tata ruang. Pengembangan ini dimaksudkan untuk dapat menarik minat investor maupun wisatawan. Diharapkan dengan adanya investor dan wisatawan yang datang ke daerah-daerah tersebut dapat mengurangi disparitas dan juga meningkatkan perekonomian setempat. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa meskipun saat ini disparitas di Kabupaten Sleman masih tinggi akan tetapi pemerintah daerah saat ini sedang berusaha memikirkan cara untuk mengurangi hal tersebut. Dalam proses pelaksanaannya memang membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat membuktikan pentingnya peran pemerintah sebagai fasilitator dalam proses percepatan pembangunan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan dapat diterik kesimpulan bahwa:

- a. Adanya pemusatan kegiatan (PKW dan PKN) berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk dan juga penggunaan lahan di Kabupaten Sleman. Penggunaan lahan di pusat kegiatan mayoritas adalah aktivitas komersial seperti perdagangan dan jasa, sementara untuk daerah yang bukan termasuk pusat kegiatan mayoritas adalah permukiman dan RTH. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan distribusi pendapatan
- b. Hasil dari klasifikasi tipologi kelas menjelaskan bahwa Kecamatan Tempel, Turi, Cangkringan, serta Prambanan termasuk dalam wilayah relatif tertinggal dan memiliki jumlah persentase penduduk miskin terbanyak. Jika dilihat dari nilai indeks Williamson dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman termasuk dalam ketimpangan moderat, artinya hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat dinikmati oleh penduduk secara merata.
- c. Peran pemerintah dalam perkembangan wilayah penting sebagai koordinator yang bertanggung jawab untuk evaluasi dan monitoring serta sebagai fasilitator yang bertugas untuk perencanaan program serta pemberi keputusan/ijin.

5. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2019*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- _____. 2019. *Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 2019. *Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Devi, M. K. 2018. *Struktur Ekonomi dan Disparitas Wilayah di Kabupaten Sleman*. KURVATEK. Vol. 03(01): pp 91-99
- Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
- Ma'ruf dan Wihastuti, 2008. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Determinan dan Prospeknya*. Jurnal ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol 9(01): pp 44-55
- Muhammad, Mukmin. 2017. *Perencanaan Pembangunan*. Makasar: CV Dua Bersaudara.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik analisis regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPPG Universitas Gadjah Mada
- Subandi. 2007. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Triyanto, Y. I. 2019. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Disparitas Wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Sleman*. Program Studi. Universitas Gadjah Mada